qointhe mand vox six (48) been qwerryuiopasdighjkizxcvbnmqwert xcapumqwertyuiopasdfghjklzxcabm Huginsedoingrampmenganighik fghjklzxcvbnnnqw. MAZIAINDAPSEGOIU qwertyuiopasdfgh acvbnmqwertyuio pasafghjklzxcvbm Wertyuiopasdfghjkly evbnmqwertyuiopas

reviennqwertyuiopae iopasdfghjklzxcvb ghjklzxcvbnmqwe

and the state of t

Verifikasi LHKASN Penilaian Internal Zona Integritas Penanganan Whistle Blower System

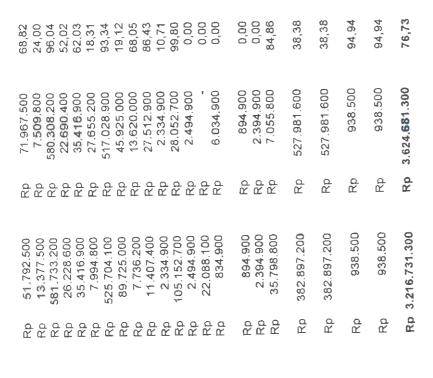
7 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

8 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

JUMLAH



INSPEKTUR

Drs. AKHMAD RUDHIANTO

Drs. AKHMAD RUDHLANIO
Pembina Utama Muda
NIP, 19590212 198503 1 018

9

N

×

REALISASI

PAGU ANGGARAN

Ю

ø

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) **INSPEKTORAT**

SKPD : INSPEKTORAT

TAHUN : 2018

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET SATUAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
1	2	4		
Meningkatnya kualitas pengawasan internal	Persentase Maturitas SPIP OPD sampai tingkat terdefinisi	25%	35%	140%
	Persentase OPD dan Desa bebas indikasi temuan kerugian daerah	90%	91,6%	101%
	Persentase kasus pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
	Persentase tindak lanjut temuan pemeriksaan	80%	85 %	106%
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD di lingkungan pemerintah	Persentase OPD yang memiliki nilai Evaluasi SAKIP minimal B	100%	100%	100%

INSPEKTUR

drs. AKHMAD RUDHIANTO

Pembina Utama Muda NIP. 19590212 198503 1 018

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

INSPEKTORAT

SKPD

: INSPEKTORAT

TAHUN

: 2018

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4
Meningkatnya kualitas pengawasan internal	Persentase Maturitas SPIP OPD sampai tingkat terdefinis	%	25
	Persentase OPD dan Desa bebas indikasi temuan kerugian daerah	%	90
	Persentase kasus pengaduan yang ditindaklanjuti	%	100
	Persentase tindak lanjut temuan pemeriksaan	%	80
		0/	400
Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD di lingkungan pemerintah	Persentase OPD yang memiliki nilai Evaluasi SAKIP minimal B	%	100

INSPEKTUR

₩ Drs. AKHMAD RUDHIANTO

Pembina Utama Muda NIP. 19590212 198503 1 018

4.3 Strategi Pemecahan Masalah

Permasalahan yang paling menonjol dalam pelaksananaan kinerja tahun 2018 adalah tingkat serapan Belanja Langsung sebesar 76,7 persen. Serapan anggaran yang kurang optimal dapat direduksi dengan cara melakukan evaluasi terhadap penyusunan skala prioritas pelaksanaan kegiatan khususnya bagi kegiatan yang bergantung kepada pihak eksternal. Perencanaan anggaran untuk kegiatan yang pelaksanaannya bergantung terhadap kinerja ekternal akan dianggarakan pada saat telah memiliki acuan yang kuat sebagai dasar pelaksanaannya.

- Penilaian Internal Zona Integritas, hal ini dikarenakan nilai Sakip Kota Batu tahun 2017 masih bernilai C, maka belum memenuhi syarat untuk mlaksanakan Penilaian Internal Zona Integritas
- Monev Aksi Pencegahan Korupsi, karena instruksi presiden agar terintregasi dengan system aplikasi yang telah ada di KPK, sehingga perlu ada koordinasi ulang tentang teknis penilaian
- 3. Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi, Dasar hukum sebagai acuan pelaksanaan sedang dalam proses penetapan
- 4. Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender, kegiatan ini belum terlaksana karena kekurangan sumber daya manusia

4.2 Kendala dan Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja serta Langkah Antisipatif

Beberapa Kendala dan hambatan pencapaian kinerja khususnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan Lingkup Inspektorat Kota Batu Tahun Anggaran 2018 secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Kendala dalam pencapaian kinerja lebih banyak disebabkan oleh faktor eksternal, kegiatan yang sangat bergantung pada faktor eksternal adalah Kegiatan Reviu RKA, Reviu RPJMD, Penilaian Internal Zona Integritas, Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi
- b. Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja
 - Beberapa kegiatan yang bergantung pada pihak eksternal kurang matang dalam proses perencanaan dan penatausahaan bukti pengeluaran oleh PPTK. Sehingga tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.
 - Terdapat penyesuaian rencana kerja dengan rencana strategis yang mengacu pada RPJMD Kota Batu 2017-2022, sehingga menghambat beberapa pelaksanaan kegiatan.

Langkah antisipatif yang akan dilakukan adalah menyesuaikan anggaran yang dikelola sesuai dengan fungsi pengawasan dan melakukan evaluasi terhadap penyusunan kerangka acuan kerja sebagai bentuk evaluasi terhadap perencanaan.

BAB IV PENUTUP

4.1 Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja

Keberhasilan kinerja Inspektorat diukur dari Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Program. Sesuai Indikator dan target yang meliputi:

- a. Opini BPK dengan target WTP.
- b. Predikat Nilai Sakip Minimal B
- Maturitas SPIP sampai dengan level 3/ terdefinisi
- d. Persentase Desa bebas temuan kerugian daerah sebesar 90 persen
- e. Persentase OPD bebas temuan kerugian daerah sebesar 90 persen
- f. Persentase kasus pengaduan yang ditindaklanjuti sebesar 100 persen
- g. Persentase Tindaklanjut temuan sebesar 85 persen
 Maka pada akhir tahun anggaran 2018, diperoleh hasil sebagai berikut :
- Predikat Nilai Sakip Minimal B untuk seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Batu telah memenuhi target sebesar 100 persen
- 2. Maturitas SPIP sampai dengan level 3/ terdefinisi telah dicapai berdasarkan penilaian dari BPKP Provisnsi Jawa Timur
- Dari 20 Pengaduan telah dilakukan tindaklanjut
- Tindaklanjut temuan telah mencapai 85 persen
- Persentase OPD bebas temuan kerugian daerah sebesar 91,6 persen
- Opini BPK dengan predikat WTP untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 yang diperiksa tahun 2018.

Namum ada beberapa kegiatan yang merupakan amanat undang undang belum terlaksana, yaitu:

h. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

1) Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Anggaran : Rp. 938.500,00

Realisasi : Rp. 891.000,00

Prosentase: 94,94%

Hasil : tersusunnya Kebijakan Pengawasan

Penjelasan : pembiayaan sesuai dengan perencanaan

Berdasarkan hasil serapan anggaran maka ada beberapa kegiatan yang merupakan pengembangan kebijakan yang belum berjalan yaitu:

- 1. Penilaian Internal Zona Integritas
- 2. Monev Aksi Pencegahan Korupsi
- 3. Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi
- 4. Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender

Anggaran Rp. 2.394.900,00

Realisasi : Rp 0,00

Prosentase : 0%

Hasil : terlaksananya penilaian internal zona

integritas sebagai pilot project Wilayah

Bersih Melayani

Penjelasan : kegiatan tidak dapat dilaksanakan

karena terkendala persyaratan dasar penilaian zona integritas (Opini BPK dan

Nilai SAKIP)

22) Penanganan Whistle Blower System

Anggaran : Rp. 7.055.800,00

Realisasi : Rp. 5.987.400,00

Prosentase : 84,86%

Hasil : tersedianya infrastruktur whistle blower

system berupa Peraturan Walikota

Penjelasan : pembiayaan sesuai dengan perencanaan

g. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

 c. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Anggaran : Rp. 527.981.600,00

Realisasi : Rp. 202.629.382,00

Prosentase : 38,38%

Hasil : terlaksananya pelatihan kantor sendiri,

diklat fungsional, dan diklat teknis bagi

tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan

Penjelasan : diklat fungsional pembentukan

Pengawas Pemerintah Muda tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan kuota

peserta.

: tersedianya infrastruktur pelaporan Hasil

gratifikasi dan pelaporan gratifikasi (2

laporan)

Penjelasan

: terdapat ketidakcermatan pelaksanaan

pengadministrasian kegiatan.

18) Money Aksi Pencegahan Korupsi

Anggaran

: Rp. 0,00

Realisasi

: Rp. 0,00

Prosentase

Hasil

: Tersusunnya Laporan Hasil Monev Aksi

Pencegahan Korupsi

Penjelasan

: terdapat pengurangan anggaran pada

proses PAK karena waktu pelaksanaan

kegiatan yang berbenturan dengan

kegiatan lainnya.

19) Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Anggaran

: Rp. 6.034.900,00

Realisasi

: Rp. 0,00

Prosentase

: 0%

Hasil

: terlaksananya pelaporan RAD PPK

terintegrasi

Penjelasan

: terdapat ketidakcermatan pelaksanaan

pengadministrasian kegiatan.

20) Verifikasi LHKASN

Anggaran

: Rp. 894.900,00

Realisasi

: Rp. 0,00

Prosentase

: 0%

Hasil

Penjelasan

: terlaksananya vefrifikasi LHKASN : kegiatan tidak dapat dilaksanakan

karena terkendala penyediaan

infrastruktur Keputusan Kepala daerah

dan akses kepada aplikasi SI HARKA

Penilaian Internal Zona Integritas

pengelolaan kas pada SKPD

Penjelasan : terdapat efisiensi pada belanja

penggandaan dan perjalanan dinas

dalam daerah.

14) Evaluasi SPIP

Anggaran

: Rp. 27.512.900,00

Realisasi

: Rp. 23.778.250,00

Prosentase

: 86,43%

Hasil

: terlaksananya penilaian maturitas SPIP

pada 10 SKPD

Penjelasan

: terdapat penyesuaian pada belanja

transportasi dan akomodasi narasumber

dari BPKP.

15) Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi

Anggaran

: Rp. 2.334.900,00

Realisasi

: Rp. 250.000,00

Prosentase

: 10,71%

Hasil

: terlaksananya penilaian mandiri

reformasi birokrasi Pemerintah Kota

Batu

Penjelasan

: terdapat ketidakcermatan

penganggaran.

16) Evaluasi Pelayanan Publik

Anggaran

: Rp. 28.052.700,00

Realisasi

: Rp. 27.996.700,00

Prosentase

: 99,80%

Hasil

: terlaksananya evaluasi pada sektor

pelayanan publik di Kota Batu.

Penjelasan

: pembiayaan sesuai dengan perencanaan

17) Penanganan Laporan Gratifikasi

Anggaran

: Rp. 2.494.900,00

Realisasi

: Rp. 0,00

Prosentase

: 0%

Anggaran : Rp. 27.655.200,00

Realisasi : Rp. 5.064.500,00

Prosentase : 18,31%

Hasil : peningkatan indeks pemberdayaan

gender

Penjelasan : terdapat ketidakcermatan

Penganggaran.

11) Penyelenggaraan Koordinasi TP4D

Anggaran : Rp. 517.028.900,00

Realisasi : Rp. 482.579.700,00

Prosentase : 93,34%

Hasil : terlaksananya pendampingan SKPD

yang telah mengajukan surat

permohonan pendampingan (5 SKPD), terlaksananya sosialisasi Peraturan

Walikota Nomor 11 Tahun 2018 tentang

Pengawalan dan Pengamanan Kegiatan

pemerintahan dan pembangunan

Daerah.

Penjelasan : pembiayaan sesuai dengan perencanaan

12) Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Anggaran : Rp. 45.925.000,00

Realisasi : Rp. 8.779.000,00

Prosentase : 19,12%

Hasil : terlaksananya pemeriksaan dengan

tujuan tertentu sesuai tujuan tertentu.

Penjelasan : pembiayaan menyesuaikan dengan

penugasan.

13) Pemeriksaan Serentak Kas Opname

Anggaran : Rp. 13.620.000,00 Realisasi : Rp. 9.268.000,00

Prosentase : 68,05%

Hasil : tersedianya Laporan Hasil Pemeriksaan

Kas Opname guna mendukung tertib

tidak terserap dengan maksimal karena menyesuaikan dengan jumlah cek fisik yang dilaksanakan.

7) Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar

Anggaran

: Rp. 580.308.200,00

Realisasi

: Rp. 557.299.000,00

Prosentase

: 96,04%

Hasil

: terlaksananya koordinasi lintas sektor

terhadap pencegahan dan

pemberantasan pungutan liar

Penjelasan

: pembiayaan sesuai dengan perencanaan

8) Money Dana Desa

Anggaran

: Rp. 22.690.400,00

Realisasi

: Rp. 11.804.000,00

Prosentase

: 52,02%

Hasil

: tersedianya Laporan Monev Dana Desa

guna pemetaan masalah pemanfaatan

dana desa.

Penjelasan

: belanja perjalanan dinas dalam daerah

tidak terserap dengan maksimal karena menyesuaikan dengan jumlah cek fisik

yang dilaksanakan.

9) Money Dana BOS

Anggaran

: Rp. 35.416.900,00

Realisasi

: Rp. 21.299.600,00

Prosentase

: 62,03%

Hasil

: tersedianya Laporan Monev Dana BOS

guna pemetaan masalah pemanfaatan

dana BOS.

Penjelasan

: terdapat penyesuaian pada belanja

karena kekurangcermatan

penganggaran

10) Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran FresponsifGender

Prosentase : 86,55%

Hasil : terlaksananya penyelesaian Tindak

Lanjut Rekomendasi LHP BPK

Penjelasan : terdapat efisiensi pada belanja makanan

dan minuman rapat.

4) Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

Anggaran : Rp. 5.719.900,00

: Rp. 4.963.500,00

Prosentase : 86,78%

Realisasi

Hasil : terlaksananya Evaluasi Temuan

Hasil Pengawasan (LHP BPK, LHP

Inspektorat Kota Batu)

Penjelasan: pembiayaan sesuai dengan

penganggaran

5) Pendampingan Pemeriksaan

Anggaran : Rp. 71.967.500,00

Realisasi : Rp. 49.529.055,00

Prosentase : 68,82%

Hasil : terlaksananya pendampingan

pemeriksaan yang dilaksanakan

pengawas eksternal

Penjelasan : terdapat penyesuaian pada belanja

makanan dan minuman tamu, belanja perjalanan dinas dalam daerah, dan belanja perjalanan dinas luar daerah.

6) Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah

Anggaran : Rp. 7.509.800,00

Realisasi : Rp. 1.802.600,00

Prosentase : 24,00%

Hasil : terlaksananya monitoring dan evaluasi

penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan prioritas pengawasan.

Penjelasan : belanja perjalanan dinas dalam daerah

Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah 9) Daerah (RPJMD)

Anggaran

: Rp. 15.886.400,00

Realisasi

: Rp. 8.813.125,00

Prosentase

: 55,48%

Hasil

: Tersusunnya Laporan Hasil Review

RPJMD 2017-2022

Penjelasan

: terdapat penyesuaian pada belanja

makanan dan minuman operasional.

f. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

Anggaran

: Rp. 121.798.000,00

Realisasi

: Rp. 36.742.200,00

Prosentase : 30,17%

Hasil

: tersusunnya LHP PKPT sebanyak 45

Obrik

Penjelasan

ketidakcermatan : terdapat

penyusunan jadwal pelaksanaan

kegiatan.

2) Penanganan

Pengaduan di Kasus

Lingkungan

Pemerintah Daerah (Non PKPT)

Anggaran

: Rp. 26.651.200,00

Realisasi

: Rp. 8.706.450,00

Prosentase : 32,67%

Hasil

: tersusunnya LHP Non PKPT sebanyak

30 kasus

Penjelasan

: terdapat penyesuaian pada belanja ATK

dan perjalanan dinas luar daerah

tergantung kebutuhan.

Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 3)

Anggaran

: Rp. 29.922.500,00

Realisasi

: Rp. 25.898.000,00

Realisasi : Rp. 2.802.375,00

Prosentase : 10,86%

Hasil : Tersusunnya Laporan Hasil Review

RKPDP TA 2018 dan Laporan Hasil

Review RKPD TA 2019.

Penjelasan : Pada DPA kegiatan Review RKPD

terdapat kesalahan penganggaran sehingga diperlukan penghitungan ulang untuk dilakukan perubahan, namun karena keterbatasan waktu pelaksanaan, anggaran yang tersedia tidak dapat terserap secara maksimal (hanya terserap pada belanja ATK, materai, dan penggandaan).

7) Review Penyerapan Anggaran

Anggaran : Rp. 0,00

Realisasi : Rp. 0,00

Prosentase : -

Hasil : Tersusunnya Laporan Hasil Review

Penyerapan Anggaran

Penjelasan : terdapat pengurangan anggaran pada

proses PAK karena waktu pelaksanaan

kegiatan yang berbenturan dengan

kegiatan lainnya.

8) Review Penyerapan Pengadaan Barang/Jasa

Anggaran : Rp. 15.335.000,00

Realisasi ; Rp. 4.569.800,00

Prosentase : 29,80%

Hasil : Tersusunnya Laporan Hasil Review

Penyerapan Pengadaan Barang/Jasa

Penjelasan : belanja perjalanan dinas dalam daerah

tidak terserap dengan maksimal karena menyesuaikan dengan jumlah cek fisik

yang dilaksanakan.

LAKIP Pemerintah Kota Batu Tahun 2017 guna peningkatan kualitas penyusunan LAKIP Kota Batu dan peningkatan nilai SAKIP SKPD.

Penjelasan

: terdapat penyesuaian efisiensi pada belanja penggandaan, belanja makan dan minum, serta belanja perjalanan dinas luar daerah karena kekurangcermatan penganggaran.

Penyusunan Statistik Pengawasan 4)

Anggaran

: Rp. 0,00

Realisasi

: Rp. 0,00

Prosentase

d -

Hasil

: Tersusunnya Statistik Pengawasan

Inspektorat Kota Batu.

Penjelasan

: terdapat pengalihan biaya (cetak) pada anggaran kegiatan rutin (Penyediaan

Barang Cetakan dan Penggandaan)

Satuan Kerja Review Rencana Kerja dan Anggaran 5) Perangkat Daerah (RKA-SKPD)

Anggaran

: Rp. 25.407.400,00

Realisasi

: Rp. 7.125.550,00

Prosentase

: 28,05%

Hasil

: Tersusunnya Laporan Hasil Review

RKAP-SKPD TA 2018 dan Laporan Hasil

Review RKA-SKPD TA 2019.

Penjelasan

: terdapat penyesuaian efisiensi pada belanja penggandaan, belanja

makan dan minum (rapat & operasional), serta belanja

perjalanan dinas luar daerah karena kekurang cermatan penganggaran.

Review Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 6)

: Rp. 25.814.500,00 Anggaran

peserta untuk mengikuti bimtek yang

diselenggarakan pihak eksternal.

Penjelasan : pelaksanaan menyesuaikan

kebutuhan/undangan.

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Anggaran

: Rp. 0,00

Realisasi

: Rp. 0,00

Prosentase

Hasil

: tersusunnya Laporan Capaian Kinerja

dan Keuangan Inspektorat Kota Batu.

Penjelasan

: terdapat pengurangan anggaran pada

proses PAK karena alasan efisiensi anggaran (berkaitan dengan tugas

fungsi).

2) Review LKPD

Anggaran

: Rp. 13.896.200,00

Realisasi

: Rp. 10.284.300,00

Prosentase

: 74.01%

Hasil

: Tersusunnya Laporan Hasil Review

LKPD pada Pemerintah Kota Batu TA

2017 untuk peningkatan kualitas penyusunan LKPD Kota Batu.

Penjelasan

: terdapat penyesuaian efisiensi pada belanja ATK, penggandaan, belanja makan dan minum, serta belanja perjalanan dinas luar daerah.

3) Evaluasi Laporan Capaian Kinerja SKPD

Anggaran

: Rp. 27.466.100,00

Realisasi

: Rp. 8.851.800,00

Prosentase

: 32,23%

Hasil

: Tersusunnya Laporan Hasil Review

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 1)

Anggaran

: Rp. 31.190.000,00

Realisasi

: Rp. 30.370.000,00

Prosentase: 97,37%

Hasil

: pengadaan batik khas Batu.

Penjelasan

: pengadaan sesuai dengan perencanaan.

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Anggaran

: Rp. 0,00

Realisasi

: Rp. 0,00

Prosentase :-

Hasil

: meliputi

pembiayaan

pendidikan

dan pelatihan penjenjangan.

Penjelasan : terdapat pengurangan anggaran pada

proses PAK karena tidak terdapat diklat

penjenjangan yang harus dibiayai.

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 2)

Anggaran

: Rp. 16.042.100,00

Realisasi

: Rp. 12.650.500,00

Prosentase: 78,86%

Hasil

: pelaksanaan kegiatan sosialisasi

peraturan perundang-undangan yang meliputi belanja ATK, belanja cetak penggandaan, dan belanja makanan

dan minuman rapat.

Penjelasan

: terdapat penyesuaian pada jumlah

peserta sosialisasi yang diundang.

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-3) undangan

Anggaran

: Rp. 24.000.000,00

Realisasi

: Rp. 18.492.528,00

Prosentase : 77,05%

Hasil

: pembiayaan kegiatan pengiriman

kerja riil tahun anggaran serta efisiensi belanja makanan dan minuman rapat.

9) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Anggaran : Rp. 136.230.000,00

Realisasi : Rp. 123.573.851,00

Prosentase : 90,71 %

Hasil : pembiayaan perjalanan dinas luar

daerah baik dalam Propinsi Jawa Timur maupun keluar Propinsi Jawa Timur sebagai penunjang pelaksanaan fungsi

pengawasan penyelenggaraan

pemerintahan.

Penjelasan : pembiayaan menyesuaikan kebutuhan.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1) Pengadaan Kendaraan Dinas

Anggaran : Rp. 412.000.000,00

Realisasi : Rp. 411.590.000,00

Prosentase: 99,90 %

Hasil : pengadaan kendaraan dinas jabatan

Penjelasan : pembiayaan sesuai penganggaran.

2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Anggaran : Rp. 164.600.000,00

Realisasi : Rp. 126.881.350,00

Prosentase : 77,08 %

Hasil : pembiayaan jasa servis, suku

cadang, BBM, dan STNK kendaraan

dinas.

Penjelasan : pembiayaan menyesuaikan kebutuhan

pemeliharaan.

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Anggaran

: Rp. 19.419.000,00

Realisasi

: Rp. 10.324.000,00

Prosentase

: 53,16%

Hasil

: pembelian peralatan dan bahan

Kebersihan, serta pengadaan mebeler

kantor.

Penjelasan

: terdapat perubahan harga pada pengadaan lemari kaca dengan

spesifikasi yang sama.

7) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan

Anggaran

: Rp. 10.241.960,00

Realisasi

: Rp. 5.040.000,00

Prosentase

: 49,21%

Hasil

: pembiayaan penyediaan surat kabar

dan cetak buku peraturan perundangundangan terbaru guna menunjang fungsi pemeriksaan penyelenggaraan

dan urusan pemerintahan.

Penjelasan

: cetak buku peraturan perundang-

undangan tidak dilaksanakan.

8) Penyediaan Makanan dan Minuman

Anggaran

: Rp. 37.465.000,00

Realisasi

: Rp. 21.183.200,00

Prosentase : 56,54%

Hasil

: pembelian makanan dan minuman

untuk harian pegawai, belanja makanan dan minuman tamu (oleh-oleh tamu kunjungan kerja), dan makanan dan

minuman operasional

kegiatan/lapangan (tumpeng dan nasi

kotak kegiatan)

Penjelasan

: belanja oleh-oleh tamu dan kunjungan

kerja menyesuaikan jumlah kunjungan

Prosentase : 85,66 %

Hasil : pembiayaan penyediaan alat tulis

kantor.

Penjelasan : terdapat penyesuaian pada belanja alat

tulis kantor menyesuaikan jumlah

pornodinos seties bules

persediaan setiap bulan.

4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Anggaran : Rp. 27.051.000,00

: Rp. 15.146.755,00

Realisasi

. IXp. 15.146.755,0

Prosentase

: 55,99%

Hasil

pembiayaan untuk pengadaan barang cetakan kantor seperti map dinas, amplop dinas serta fotokopi

dokumen administrasi kantor, termasuk belanja cetak karangan bunga dan

umbul-umbul.

Penjelasan

: terdapat penyesuaian pada belanja cetak

karangan bunga dan umbul-umbul bergantung kebutuhan riil tahun berjalan, penyesuaian pada

belanja cetak statistic Inspektorat Tahun 2017 (belum dapat naik cetak), serta penghitungan ulang biaya penggandaan.

5) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Anggaran

: Rp. 258.094.000,00

Realisasi

: Rp. 248.234.940,00

Prosentase

: 96,18%

Hasil

: meliputi pengadaan meteran roda

digital, PC, laptop, printer, LCD

Proyektor, scanner, wallscreen, kamera digital, dan wireless portable speaker.

Penjelasan

: pengadaan sesuai dengan perencanaan.

6) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.

3.3 Prestasi yang dicapai Tingkat Provinsi dan Nasional

Prestasi yang diperoleh dari kinerja Pengawasan adalah Penilaian Badan Pemeriksa Keuangan berpredikat Wajar Tanpa pengecualian (WTP) 3 (tiga) tahun berturut-turut mulai tahun 2016, 2017 dan 2018

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran, total belanja sebesar Rp. 9.118.514.382,00 terbagi atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 5.493.833.082,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 3.624.681.300,00 sampai dengan akhir anggaran Realiasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.4.750.242.687,00 Realisasi Belanja Langsung Sebesar Rp.2.781.182.131,00 Dengan rincian sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Anggaran : Rp. 198.500.000,00

Realisasi : Rp. 187.550.000,00

Prosentase : 94,48%

Hasil : pembayaran honorarium pengelola

keuangan, pelaksana pengadaan barang

jasa dan honorarium pegawai

honorer/tidak tetap.

Penjelasan : pembayaran sesuai penganggaran

2) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Anggaran : Rp. 6.486.000,00

Realisasi : Rp. 945.000,00

Prosentase : 14,57 %

Hasil : pembiayaan jasa servis PC,

laptop,cprinter, dan mesin fotocopy.

Penjelasan : pembiayaan menyesuaikan kebutuhan

pemeliharaan.

3) Penyediaan Alat Tulis Kantor

Anggaran : Rp. 47.647.140,00

Realisasi : Rp. 40.814.300,00

kinerja SKPD di Evalu lingkungan minin pemerintah		
---	--	--

Tabel 3.1 Tabel Capaian Kinerja

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Indikator Kinerja Utama Inspektorat yaitu Opini BPK berpredikat WTP dan Nilai Sakip berpredikat Baik telah tercapai. Indikator Kinerja Program yaitu Persentase Maturitas SPIP OPD sampai tingkat terdefinisi, Persentase OPD dan Desa bebas indikasi temuan kerugian daerah, Persentase kasus pengaduan yang ditindaklanjuti, Persentase tindak lanjut temuan pemeriksaan dan Presentase OPD dengan Predikat Sakip B telah tercapai dengan sangat baik. Namun perlu ada perbaikan untuk meningkatkan tingkat substansi. Karena cara perolehan nilai target untuk Persentase Maturitas SPIP OPD sampai tingkat terdefinisi dan Persentase OPD dan Desa bebas indikasi temuan kerugian daerah masih menggunakan metode uji petik atau sampling.

Keterbatasan Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia yang ada di Inspektorat menjadi sebuah kendala dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh. Keterbatasan jumlah personel APIP menyebabkan tidak semua Entitas mendapatkan pengawasan. Kekurangan Kualitas SDM APIP dapat diketahui dari penilaian kapabilitas APIP. Kapabilitas APIP secara Nasional harus berada pada level 3, namum Kapabilitas APIP Kota Batu masih berada pada menuju level 2.

Secara kelembagaan Jabatan Fungsional Audtor dan P2UPD baru dibentuk secara resmi pada tahun 2018, sehingga dibutuhkan kerja keras dalam meningkatkan kapabilitas APIP Level 3 sebagaimana target Nasional. Agar Tingkat Kapabilitas APIP meningkat dari rintisan Level 2 menjadi Level 3 diperlukan beberapa rencana percepatan dengan membentuk tim Peningkatan Kapabilitas APIP. Sehingga tujuan Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan akuntanbel dapat terwujud.

b. Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah

Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah secara teknis dapat diperoleh apabila Predikat Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah berpredikat minimal Baik. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) merupakan evaluasi dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja OPD. Penilaian SAKIP dilakukan atas dokumen yang dipersayaratkan dalam Lembar Kerja Evaluasi. Evaluasi SAKIP dilaksanakan kepada 29 entitas. Pada tahun 2018 Evaluasi Sakip dilaksanakan 3 Kali dengan metode penilaian berkas, desk verifikasi, dan evaluasi bersama Tim Penilai. Seluruh OPD telah dilakukan evaluasi dengan hasil nilai antara 60,1 Sampai dengan 69,9. 27 OPD telah mencapai nilai B pada saat proses desk. Dan 2 OPD mencapai nilai B pada saat evaluasi bersama Tim Penilai. Maka capaian kinerja sebesar 100 persen.

Maka Kinerja Inspektorat dapat direkapitulasi sebagaimana tabel dibawah ini.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET SATUAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
1	2	4	5	6
Meningkatnya kualitas pengawasan internal	Persentase Maturitas SPIP OPD sampai tingkat terdefinisi	25%	35%	140%
	Persentase OPD dan Desa bebas indikasi temuan kerugian daerah	90%	91,6%	101%
	Persentase kasus pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
	Persentase tindak lanjut temuan pemeriksaan	80%	85 %	106%
2. Meningkatnya akuntabilitas	Persentase OPD yang memiliki nilai	100%	100%	100%

Modal, Perijinan dan Tenaga Kerja dan Dinas Sosial. Berdasarkan hasil reviu dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa timur Nomor: LR-701/PW13/3/2018 tanggal 18 September 2018 Maturitas SPIP Pemerintah Kota Batu yang direviu secara uji petik terhadap 10 OPD diperoleh Nilai 3,2761 atau dengan kata lain telah memiliki Maturitas SPIP tingkat terdefinisi.

Indikator persentase OPD dan Desa bebas indikasi temuan kerugian daerah dilaksanakan melalui kegiatan Pemeriksaan Rutin (PKPT) yang diilaksanakan secara uji petik kepada 36 Obrik dari 72 Obrik diperoleh hasil bahwa terdapat 3 entitas yang memiliki indikasi kerugian daerah karena kurang cermat dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa. Namun temuan tersebut telah ditindaklanjuti dengan pengembalian kelebihan bayar pengadaan barang dan jasa kepada Kas Negara. Sehingga pada Tahun 2018 dengan target Persentase OPD dan Desa bebas indikasi temuan kerugian daerah sebesar 90 persen tercapai 91,6 persen

Indikator Persentase kasus pengaduan yang ditindaklanjuti merupakan salah satu bentuk pelayanan pengaduan khususnya pengaduan terhadap Aparatur Sipil Negara. Dalam tahun 2018 terdapat 20 Kasus pengaduan 7 masalah kepegawaian, 10 masalah rumah tangga dan 3 indikasi pidana dan kerugian daerah. Target tahun 2018 sebesar 100 persen telah dilaksanakan semua.

Indikator Persentase tindak lanjut temuan pemeriksaan dengan target sebesar 80 persen, dapat diketahui melalui perhitungan dari tindaklanjut temuan dari pemeriksaan APIP dan tindaklanjut temuan dari Badan Pemeriksa keuangan. Pada Tahun 2018 Tindaklanjut Pemeriksaan Oleh APIP dilaksanakan kepada 9 entitas dan telah ditindaklanjuti tuntas 7 entitas, sedangkan 2 entitas sedang dalam proses tindak lanjut. Untuk Tindaklanjut Pemeriksaan Badan Pemeriksan Keuangan dari 702 Rekomendasi Tindak Lanjut telah terselesaiakan 600 rekomendasi. Maka dapat disimpulkan bahwa tindak lanjut temuan pemeriksaan diperoleh nilai kinerja sebesar 85 %.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 2018

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Inspektorat berdasarkan indikator kinerja utama Inspektorat yaitu :

a. Meningkatnya kualitas pengawasan internal .

Meningkatnya kualitas pengawasan internal dengan indikator Opini BPK berpredikat WTP, secara teknis dapat diperoleh apabila pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan Standart Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan yang baik. Untuk mendapatkan Opini BPK berpredikat WTP maka peran Inspektorat melalui fungsi pengawasan ada 2(dua), yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan sesuai SAP dan pengawasan terhadap Sistem pengendalian Internal Pemerintahan.

Melalui Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan indikator:

- 1. Persentase Maturitas SPIP OPD sampai tingkat terdefinisi
- Persentase OPD dan Desa bebas indikasi temuan kerugian daerah
- 3. Persentase kasus pengaduan yang ditindaklanjuti
- 4. Persentase tindak lanjut temuan pemeriksaan

Indikator Persentase Maturitas SPIP OPD sampai tingkat terdefinisi pada tahun 2018 target yang dibebankan adalah 25 persen OPD memiliki maturitas SPIP tingkat terdefinisi, maka penilaian tahun 2018 dilaksanakan pada 10 OPD yang merepresentasikan entitas Pemerintah Daerah, yaitu: Inspektorat, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Bagian Organisasi, Badan Keuangan Daerah, Dinas Penanaman

7.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	527.981.600,-	APBD Tahun 2018
8.	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	938.500,-	APBD Tahun 2018
	Jumlah	3.624.681.300,-	APBD Tahun 2018

1	Persentase tindak lanjut temuan pemeriksaan	%	80
	Persentase kasus pengaduan yang ditindaklanjuti	%	100
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD di lingkungan pemerintah	Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi minimal B	%	100

Program setelah PAK :

NOMOR	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	741.134.100,-	APBD Tahun 2018
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	576.600.000,-	APBD Tahun 2018
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	31.190.000,-	APBD Tahun 2018
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	40.042.100,-	APBD Tahun 2018
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	123.805.600	2018
6.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1.582.989.400	APBD Tahun 2018

3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	31.190.000,-	APBD Tahun 2018
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	41.998.100	APBD Tahun 2018
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	147.053.500	APBD Tahun 2018
6.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1.807.080.900	APBD Tahun 2018
7.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	382.897.200,-	APBD Tahun 2018
8.	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	938.500,-	2018
	Jumlah	3.216.731.3 00,-	APBD Tahun 2018

C. Setelah Penetapan RPJMD dan Perubahan anggaran

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4
1. Meningkatnya kualitas pengawasan internal	Persentase Maturitas SPIP OPD sampai tingkat terdefinisi	%	25
	Persentase OPD bebas indikasi temuan kerugian daerah	%	90
	Persentase Desa bebas indikasi temuan kerugian daerah	%	25

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2018

B. Sebelum Penetapan RPJMD 2017-2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4
Meningkatnya akuntabilitas	Persentase Laporan Keuangan Sesuai SAP	%	80
pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang nilai SAKIP minimal B	%	50
	Peresentase PD yang maturitas SPIP sampai tingkat "terdefinisi"	%	25
	Persentase Desa bebas dari temuan kerugian daerah	%	80
	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (Eksternal & Internal) Yang Ditindaklanjuti	%	80
	Persentase Pengaduan/kasus Yang Ditindaklanjuti	%	100
Meningkatnya kapabilitas dan profesionalitas APIP	Tingkat Kapabilitas APIP	Level	2
	Persentase terlaksananya kegiatan pengawasan yang telah direncanakan	%	100

Program:

NOMOR	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	640.973.100,-	APBD Tahun 2018
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	164.600.000,-	APBD Tahun 2018

MATRIKS RENSTRA INSPEKTORAT Periode Tahun 2017 - 2022

Maningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan akuntabel

No.	No. Indikator Kinerja Tujuan Formulasi Perhitungan / Definisi Operas	Formulasi Perhitungan / Definisi Operasional	Operasi O Kota Ba	onal	WTP (LKPD TA 2016)	SI AWS	2016)	2022 WTP
2		Penilaian BPK atas Audit terhadap LNFU Nota Batt	D KON B	the state of the s		0		
1. Opin	SAKIP	Penilaian KemenPAN RB ternadap SANIF NOVA CONTROL	P NOTO P					
	- Histor Kinoria Sacaran	Formulasi Perhitungan / Definisi	Kondisi Awal 2018	2018	2019	2020	2021	2022
Sasaran	Indikator wherea seems.				1	7	8	9
		3	4	5	0	-	0	
1	2	U						
Meningkatnya kualitas pengawasan internal	Persentase Maturitas SPIP OPD sampai tingkat terdefinisi	(LHE SPIP OPD tingkat terdefinisi/LHE SPIP OPD Total) x 100%	V/N	25%	50%	75%	100%	100%
	Persentase OPD dan Desa bebas indikasi	Jumlah OPD dan Desa bebas dari temuan kerugian daerah/	87.50%	909%	95%	95%	100%	100%
	persentase kasus pengaduan yang	umlah pengaduan/kasus yang ditangani/ jumlah seluruh pengaduan/kasus yang jumlah seluruh pengaduan/kasus yang	104%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase tindak lanjut temuan	Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan (eksternal & internal) yang ditindaklanjuti/ Jumlah seluruh	87%	80%	90%	95%	100%	100%
Meningkatnya		reko	34 %	50 %	75%	100%	100% 100% 100%	100%
akuntabilitas kinerja SKPD di lingkungan	Persentase OPD yang memiliki nilai Evaluasi SAKIP minimal B		54 70	3	+			
pemernican	Persentase OPD yang memiliki dokumen	Jumlah OPD dengan Kelengkapan Dokumen Sakip OPD Total) x 100%	75%	100%	6 100%	100%	%OUT 9	TOO

- Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan akuntabel dengan Indikator;
 - a) Opini BPK
 - b) Predikat Nilai SAKIP

Untuk meraih Opini BPK maka Inspektorat Kota Batu memiliki sasaran meningkatnya kualitas pengawasan internal dengan Indikator Persentase Maturitas SPIP OPD sampai tingkat terdefinisi dengan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;

- 1. Persentase OPD dan Desa bebas indikasi temuan kerugian daerah
- 2. Persentase tindak lanjut temuan pemeriksaan
- 3. Persentase kasus pengaduan yang ditindaklanjuti

Untuk meraih Predikat nilai SAKIP maka Inspektorat Kota Batu memiliki sasaran dengan Meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD di lingkungan pemerintah dengan Indikator Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi minimal B dengan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan;

1. Persentase OPD yang memiliki dokumen sakip sesuai ketentuan.

2.3 Matriks Renstra Inspektorat Kota Batu

Untuk mengembangkan visi misi Inspektorat Kota Batu tersebut maka tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam matriks sebagai berikut sebagai berikut :

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Organisasi

A. Visi

Visi Inspektorat Kota Batu (berdasarkan tujuan RPJMD Kota Batu 2018 - 2022) adalah :

"Meningkatkan penyelenggaran pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntanbel guna mewujudkan Batu Kota Berintegritas"

B. Misi

Misi Inspektorat Kota Batu:

"Meningkatnya kualitas Tata Kelola Pemerintahan"

C. Tujuan

"Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan akuntanbel"

Indikator Tujuan: 1. Opini BPK, 2. Skor Nilai SAKIP

D. Sasaran

- Meningkatnya kualitas pengawasan internal;
- 2) Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD di Lingkungan Pemerintah.

Indikator sasaran:

- 1. Persentase maturitas SPIP OPD sampai tingkat "terdefinisi"
- 2. Persentase PD yang nilai evaluasi SAKIP minimal B

2.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Inspektorat Kota Batu

A. Sasaran Strategis Inspektorat Kota Batu

Dalam mewujudkan visi, menjalankan misi, dan mencapai tujuan yang diharapkan maka strategi pokok yang ditempuh Inspektorat Kota Batu adalah:

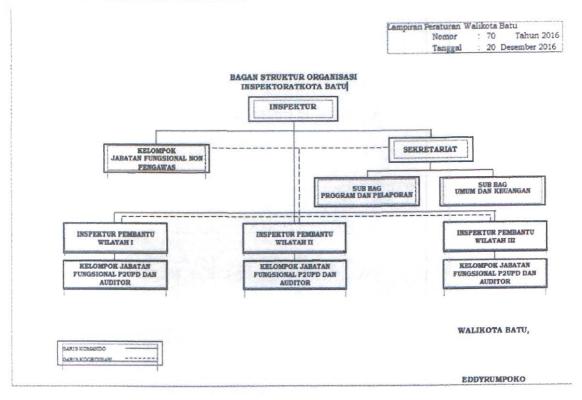
1.4 DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah Pegawai Inspektorat Kota Batu Berdasarkan Jabatan Struktural Tahun 2018

NO	JABATAN STRUKTURAL	JUMLAH
1	Inspektur (Eselon IIb)	1
2	Inspektur Pembantu/Sekretaris (Eselon III a)	4
3	Kepala Seksi / Kepala Sub Bagian (Eselon IVa)	2
4	Auditor	19
5	Pengawas Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD)	7
6	Pelaksana	11
	Jumlah	44

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kota Batu berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2013 dan tanggal 28 Juni 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Batu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Batu Nomor 70 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:



dan melaporkan hasil pemeriksaan kepada Wakil Walikota dan secara administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Walikota Batu Nomor 70 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, serta tata kerja Inspektorat kota Batu Inspektorat mempunyai tugas membantu Walikota, membina, dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program bidang pengawasan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang
 Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 10. Peraturan Walikota Batu Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kota Batu sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Batu Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Batu.

Untuk mewujudkan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di bidang pengawasan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, Inspektorat selaku Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis tahun 2018 – 2022 dan Rencana Kerja Tahunan 2018 yang menjadi pedoman instansi untuk mengimplementasikan tugas dan fungsi bidang urusan pengawasan serta pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya. Ketentuan pelaksanaan program instansi pemerintah dituntut memenuhi akuntabilitas berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja.

Kedudukan Inspektorat Kota Batu merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki unsur pengawasan daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Inspektorat sebagai lembaga pengawas internal yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab langsung kepada Walikota

BAB I PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Inspektorat Kota Batu ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Batu, sedangkan rincian tugas pokok dan fungsinya diatur dalam Peraturan Walikota Batu Nomor 30 Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Batu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan rincian tugas pokok dan fungsinya diatur dalam Peraturan Walikota Batu Nomor 70 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kota Batu. Dasar hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja adalah:

- Tap MPR RI Nomor XI/MPR/98 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan
 Negara yang bersih, bebas Korupsi, Kolusi, Nepostisme;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Penanganan Kasus-kasus yang berindikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- 7. Intruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

DAFTAR ISI

KATA DAFTA	PENG UR ISI	ANTAR	
BAB I		NDAHULUAN	i
	1.1 1.2 1.3 1.4	Gambaran Umum Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi	1 3 4 5
BAB II	PEF	RENCANAAN KINERJA	_
	2.1 2.2	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Organisasi Sasaran Strategis dan Indikata	6 6
	2. 3 2.4	Matriks Renstra Inspektoret	7
BAB III	0.1	NTABILITAS KINERJA TAHUN 2018 Pengukuran Capaian Kinerja	9
	3.2	Kinerja Capaian	13 16
	3.3	Nasional Nasional Tingkat Provinsi dan	17
D4D ****	3.4	1. Cataligan	17
BAB IV	PEN 4.1 4.2	U TUP Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja Kendala dan Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja serta Langkah Antisipatif	33
	4.3	serta Langkah Antisipatif Strategi Pemecahan Masalah	34 35

khususnya dalam menunjang fungsi pengawasan berdasarkan Standart Akuntansi Pemerintahan yang telah ditetapkan.

Di atas ketidak sempurnaan dalam penyusunan, diharapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kota Batu Tahun Anggaran 2018 ini dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan lingkup Pemerintah Kota Batu secara lebih optimal.

Batu, Januari 2019

INSPEKTUR

Drs. AKHMAD RUDHIANTO

Pembina Utama Muda NIP. 19590212 198503 1 018

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kota Batu Tahun Anggaran 2018 adalah dokumen pertanggungjawaban Inspektorat Kota Batu untuk periode satu tahun, yang memuat hasil pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2018 yang dilaksanakan langsung maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat yang dapat dijadikan sebagai pedoman dan penentuan arah kebijakan dalam penyelenggaraan fungsi pembinaan dan pengawasan pada tahun mendatang.

Penjabaran dari LAKIP tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran dan rekomendasi laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2018 serta hasil pemeriksaan yang valid, akurat, akuntabel dan obyektif kepada Kepala Daerah dalam menentukan kebijakan lebih lanjut terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah khususnya pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam LAKIP dimaksud masih dibutuhkan peningkatan sumber daya manusia, peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan sistem pengawasan serta peningkatan sistem informasi yang bermuara pada optimalisasi pelaksanaan baik dari sisi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah maupun dalam penentuan objek pemeriksaan sehingga penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan dengan baik dan bersih.

Memperhatikan beberapa hal tersebut, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kota Batu Tahun Anggaran 2018 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan



PENERNIAH KOTA BATU

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

2018

INSPEKTORAT KOTA BATU

Balarkota Artenis Tares Geres de Asantas

